

**DIGITALISASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI APLIKASI
KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR TERINTEGRASI
(KEMBANG KOPI) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR**

Atori Aziz Maulidana
NPP. 32.0512

Asdaf Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik
Email: azizmaulidana@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Yeti Fatimah, S.Sos, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The implementation of digitalized civil servant management through the KEMBANG KOPI application at the BKPSDM of Jember Regency still faces several challenges. Although the application is designed to facilitate the management of training data and competency development, many civil servants have not fulfilled their obligations to participate in these development activities. This condition indicates a gap between the intended objectives of the digital system and its actual use in the field, highlighting the need for further analysis to assess its effectiveness and the challenges in its implementation.*

Purpose: *This study aims to analyze the implementation of digitalization in ASN management through the KEMBANG KOPI application at the Regional Personnel and Human Resource Development Agency (BKPSDM) of Jember Regency. Method:* *This research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques such as interviews, observations, and documentation. Data analysis is conducted using Indrajit's (2016) e-government digitalization theory, which covers three main elements: support, capacity, and value. Results:* *The findings indicate that the KEMBANG KOPI application simplifies the process of reporting and proposing the development of apparatus competencies. However, challenges remain, such as low participation from regional devices with high employee mobility. The success of the application's implementation is supported by factors such as leadership support, technological infrastructure, and ease of access for users. Conclusion:* *The study at BKPSDM Jember Regency demonstrates that the KEMBANG KOPI application facilitates civil servants in managing their competency development independently, supported by regulations, infrastructure, and adequate human resources. However, participation remains low in regional devices with high mobility. BKPSDM has conducted socialization and evaluation to improve the application's effectiveness.*

Keywords: *Digitalization, ASN Management, KEMBANG KOPI, Competency Development*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Implementasi digitalisasi manajemen ASN melalui aplikasi KEMBANG KOPI di BKPSDM Kabupaten Jember masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan data pelatihan dan pengembangan kompetensi, masih banyak ASN yang belum memenuhi kewajibannya dalam mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pengembangan sistem digital dengan realitas penggunaan di lapangan, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui efektivitas dan tantangan penerapannya. Tujuan:* *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan digitalisasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui aplikasi KEMBANG KOPI di Badan Kepegawaian dan Pengembangan*

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jember. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori digitalisasi *e-government* dari Indrajit (2016) yang mencakup tiga elemen utama: support (dukungan), capacity (kapasitas), dan value (manfaat). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi KEMBANG KOPI mempermudah proses pelaporan dan pengusulan pengembangan kompetensi aparatur. Namun, masih terdapat kendala seperti rendahnya partisipasi dari perangkat daerah yang memiliki pegawai dengan mobilitas tinggi. Keberhasilan implementasi aplikasi ini didukung oleh faktor-faktor seperti dukungan pimpinan, infrastruktur teknologi, serta kemudahan akses bagi pengguna. **Kesimpulan:** Penelitian di BKPSDM Kabupaten Jember menunjukkan bahwa aplikasi KEMBANG KOPI mempermudah PNS dalam mengelola pengembangan kompetensi secara mandiri, didukung oleh regulasi, infrastruktur, dan SDM yang memadai. Meski demikian, partisipasi masih rendah di perangkat daerah dengan mobilitas tinggi. BKPSDM telah melakukan sosialisasi dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas aplikasi.

Kata Kunci: Digitalisasi, Manajemen ASN, KEMBANG KOPI, Pengembangan Kompetensi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan di berbagai sektor. Hal ini sejalan dengan temuan Yonghua Ji dkk (2025), yang mengeksplorasi bagaimana teknologi informasi memengaruhi desain sistem informasi, fungsionalitas, operasi, dan manajemen, serta menyoroti isu-isu manajerial dan strategis yang muncul dari pengelolaan teknologi informasi. Termasuk dalam manajemen sumber daya manusia (SDM). Menurut Nurdin dkk (2024) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan dan optimalisasi sumber daya manusia dalam sebuah organisasi yang tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas kinerja, tetapi juga menjadi motivasi untuk peningkatan kinerja dan profesionalisme pegawai. Menurut Amri (2021) manajemen sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan organisasi, seiring dengan perkembangan teknologi yang mengubah perannya dari fungsi administratif menjadi elemen yang penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Mathis dan Jackson (2011) menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pegawai yang kompeten dan terlibat dalam aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Digitalisasi manajemen SDM memungkinkan otomatisasi banyak proses yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pengelolaan data pegawai, rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan penggajian. Proses yang lebih efisien ini memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Dengan teknologi, organisasi juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih fleksibel, meningkatkan produktivitas, serta daya saing, yang sangat penting dalam menghadapi perubahan dunia yang semakin dinamis. Menurut Wijaya, Nugroho, & Hadi (2022) di era digital, manajemen sumber daya manusia tetap melaksanakan semua peran tradisionalnya, dengan kata lain yang lebih efektif, efisien, produktif, dan responsif, berkat literasi teknologi dan kemampuan dalam analitik SDM.

Di sektor pemerintahan, digitalisasi berperan penting dalam menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Puron-Cid, Luna-Reyes, dan Gil-Garcia:2021). Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan dapat menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan tugasnya, seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE mendorong perubahan birokrasi pemerintah yang lebih modern dan efisien, dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas. Melalui digitalisasi, ASN diharapkan bisa mengoptimalkan kinerjanya, lebih

responsif terhadap perubahan, serta memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan berkualitas.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jember memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan kepegawaian dan pengembangan kompetensi ASN di daerah tersebut. Namun, tantangan besar muncul akibat banyaknya ASN yang belum memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi. Berdasarkan laporan, terdapat banyak ASN yang belum menginput sertifikat pelatihan yang mereka ikuti, baik pelatihan klasikal maupun nonklasikal. Ketidaklengkapan data ini menghambat proses verifikasi dan pencatatan kompetensi ASN, yang tentunya berdampak pada kualitas SDM di Pemerintah Kabupaten Jember. Hal ini juga mengindikasikan adanya kesadaran yang rendah dari ASN mengenai pentingnya pengelolaan kompetensi, serta kurangnya koordinasi antar instansi yang tersebar di berbagai wilayah.

Dalam mengatasi masalah ini, BKPSDM Kabupaten Jember mengembangkan aplikasi KEMBANG KOPI (Kegiatan Pengembangan Kompetensi Aparatur Terintegrasi). Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan sertifikat kompetensi ASN dengan memungkinkan mereka untuk menginput sertifikat pelatihan mereka secara langsung. Fitur pengusulan dalam aplikasi ini juga memungkinkan ASN untuk mengusulkan pengembangan kompetensi yang ingin diikuti, sehingga proses pengembangan kompetensi menjadi lebih terintegrasi dan efisien. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan ASN di Kabupaten Jember lebih sadar akan pentingnya pengelolaan sertifikat kompetensi mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas SDM di pemerintahan daerah dan mendukung tercapainya tujuan SPBE.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Digitalisasi manajemen ASN di BKPSDM Kabupaten Jember melalui aplikasi KEMBANG KOPI belum berjalan optimal. Banyak ASN belum menginput data pelatihan, menunjukkan rendahnya partisipasi dan kesadaran akan pentingnya pengembangan kompetensi. Padahal, aplikasi ini dirancang untuk mempermudah dan mengefisienkan proses tersebut. Kesenjangan antara tujuan digitalisasi dan praktik di lapangan menjadi alasan penting dilakukannya penelitian ini.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait digitalisasi dalam dunia pemerintahan. Penelitian yang dilakukan oleh Zuraida, dkk menemukan bahwa Dispendukcapil Kota Surabaya telah berhasil membuat aplikasi Klampid New Generation (KNG) sebagai aplikasi pengikut zaman digitalisasi, serta dapat menjangkau semua penduduk Kota Surabaya. Adanya aplikasi ini membantu warga dalam pengajuan administrasi kependudukan sehingga warga Kota Surabaya dapat tertib akan administrasi kependudukan (Zuraida et al., 2023). Selanjutnya, penelitian oleh Bambang Suprianto menemukan bahwa penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik belum optimal karena adanya berbagai kendala, seperti kurangnya pemanfaatan digitalisasi dalam penyimpanan dokumen, gangguan jaringan, dan lambatnya respon pelayanan (Suprianto, 2023). Penelitian lainnya dilakukan oleh Nurrahman, dkk menemukan bahwa pemanfaatan website sebagai bentuk digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Garut telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun masih perlu melakukan peningkatan dari ketersediaan infrastruktur dan peningkatan kemampuan serta keterampilan sumber daya manusia terutama pengelola website dinas. (Nurrahman et al., 2021). Penelitian selanjutnya oleh Galih Amanuha, dkk menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi pemerintahan melalui SIMRAL di lingkup Kabupaten Serang pada beberapa indikator menunjukkan hasil yang cukup baik, meliputi content development, cyber laws dan capital. Adapun 3 indikator lainnya menunjukkan hasil yang kurang (Amanuha et al., 2021). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nugraha Rachmatullah dan Fenny Purwani yang menemukan

bahwa terdapat permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam proses digitalisasi dan perkembangan infrastruktur teknologi informasi ini. Maka dari itu, dibutuhkan pemanfaatan dan peningkatan kualitas e-government yang lebih baik, sekaligus meratakan pembangunan digitalisasi ini. diharapkan dari digitalisasi ini proses penyampaian informasi dan pelayanan public kepada masyarakat menjadi efektif dan efisien (Rachmatullah, 2022). Penelitian selanjutnya oleh Asniati Bahari, dkk hasil dari kegiatan ini adalah terciptanya satu Sistem Informasi Nagari (SIMNag) Nagari Kamang Mudiak yang bermanfaat bagi Pemerintahan Nagari dalam lima tahapan E-Government. Kesimpulan dari kegiatan ini terlihat bahwa SIMNag dapat memfasilitasi kebutuhan pemerintahan Nagari Kamang Mudiak dalam melayani masyarakat secara digital karena SIMNag juga dilengkapi dengan surat elektronik dan arsip elektronik. (Bahari et all., 2023)

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terkait digitalisasi dalam manajemen ASN khususnya pada aspek pengembangan kompetensi. Selain itu, dimensi dan indikator yang difokuskan dan digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Indrajit (2016) yang menyatakan bahwa untuk menerapkan digitalisasi dalam pelayanan sektor publik terdapat tiga elemen-elemen sukses yaitu : *Support* (Dukungan), *Capacity* (Kapasitas). Dan *Value* (Manfaat) (Indrajit, 2010). Adapun Lokasi yang menjadi fokus penelitian juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana digitalisasi manajemen ASN melalui Aplikasi KEMBANG KOPI di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.

II. METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas bagaimana penerapan digitalisasi manajemen ASN pada instansi pemerintahan. Untuk melakukannya secara sistematis dan ilmiah, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena lebih cocok untuk jenis penelitian ini karena masalahnya berada dalam konteks sosial yang terus berubah. Sebagaimana dijelaskan oleh Simanggunsong (2016), setiap penelitian kualitatif pemerintahan dapat menggunakan berbagai pendekatan desain penelitian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pendekatan ini disesuaikan dengan jenis penelitian kualitatif alami, yaitu fenomena muncul secara acak sesuai dengan prinsip alami. Metode penelitian kualitatif, yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk mengeksplorasi kondisi objek yang alami dengan peneliti sebagai instrumen utama, menggabungkan beberapa sumber melalui triangulasi, serta menganalisis data secara induktif, dengan fokus pada makna daripada generalisasi (Nurdin & Hartati, 2019:42).

Penelitian dilakukan secara induktif, yaitu dari kasus khusus menuju pemahaman umum, guna menggambarkan secara menyeluruh bagaimana digitalisasi diterapkan dalam manajemen ASN. Data penelitian dibagi menjadi dua jenis: data primer, yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder, yang berasal dari sumber yang sudah ada, seperti laporan dan publikasi lainnya (Simanggunsong, 2016). Untuk pemilihan informan, digunakan teknik purposive sampling, yang memilih individu yang relevan berdasarkan pengetahuan dan wewenangnya (Sugiyono, 2014). Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman, yang melibatkan tiga tahapan utama: reduksi

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Reduksi data bertujuan untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data menyusun informasi dalam format yang mudah dipahami, dan penarikan kesimpulan dilakukan untuk menemukan pola atau temuan penting yang menjawab rumusan masalah penelitian (Miles & Huberman, 1992).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Digitalisasi Manajemen ASN Melalui Aplikasi KEMBANG KOPI Di BKPSDM Kabupaten Jember

Digitalisasi dalam layanan bagi PNS merupakan proses pemanfaatan teknologi digital untuk mengubah, memperbaiki, dan meningkatkan cara layanan kepegawaian dikelola dan disediakan. Hal ini mencakup penggunaan berbagai alat dan platform digital guna menjadikan layanan kepegawaian lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh pegawai. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jember telah menerapkan digitalisasi dalam layanan kepegawaian salah satunya di bidang pengembangan kompetensi yakni Aplikasi KEMBANG KOPI (Kegiatan Pengembangan Kompetensi Aparatur Terintegrasi). Inisiatif ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi serta kemudahan bagi PNS Pemerintah Kabupaten Jember dalam memenuhi kewajiban mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi minimal sebanyak 20 JP dalam satu tahun. Dengan memanfaatkan teknologi digital, KEMBANG KOPI memungkinkan PNS mengakses layanan dengan lebih praktis dan terbantu dalam pemenuhan kewajiban pengembangan kompetensinya. Sistem ini dilengkapi dengan berbagai fitur, seperti pelaporan dan pengusulan pengembangan kompetensi. Berikut adalah hasil penelitian dan pembahasan yang penulis dapatkan dari lokus penelitian berdasarkan dimensi yang sudah disesuaikan dengan teori sebagai berikut:

1. Support (Dukungan)

Pada dimensi Support (Dukungan), dapat disimpulkan bahwa dukungan pimpinan, khususnya Bupati Jember, memiliki peran sentral dalam keberhasilan implementasi digitalisasi pengembangan kompetensi ASN melalui aplikasi KEMBANG KOPI. Komitmen pimpinan tercermin dari dukungan penuh Bupati terhadap pengembangan kompetensi ASN, yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Komitmen ini tidak hanya bersifat wacana, tetapi diwujudkan secara nyata melalui Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2022, yang mewajibkan PNS untuk mengikuti pengembangan kompetensi. Pada dukungan kebijakannya ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Bupati Nomor 800/7428/414/2023 sebagai bentuk tindak lanjut operasional pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi yang terintegrasi dengan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember. KEMBANG KOPI bertujuan untuk memfasilitasi pelaporan dan evaluasi kegiatan pengembangan kompetensi oleh setiap Perangkat Daerah maupun individu PNS. Keterlibatan langsung BKPSDM dalam verifikasi kegiatan, serta penerbitan sertifikat resmi, menunjukkan bahwa aplikasi ini telah menjadi sistem yang menyeluruh dan terstruktur. Program ini tidak hanya mendukung kebutuhan pengembangan kompetensi ASN, tetapi juga menjadi refleksi dari komitmen pimpinan dalam mewujudkan layanan kepegawaian yang modern, responsif, dan berbasis digital.

2. Capacity (Kapasitas)

Berdasarkan hasil penelitian, kapasitas dalam mendukung implementasi digitalisasi melalui aplikasi KEMBANG KOPI di BKPSDM Kabupaten Jember mencakup tiga indikator utama, yaitu infrastruktur teknologi informasi, ketersediaan SDM yang terampil, dan anggaran. Dari sisi infrastruktur, perangkat keras dan jaringan internet yang tersedia telah memadai untuk mendukung operasional aplikasi, meskipun sesekali terjadi gangguan server, namun dapat

segera diatasi tanpa mengganggu proses kerja secara signifikan. Ketersediaan SDM juga menjadi faktor pendukung utama, di mana para operator aplikasi dari jabatan fungsional di bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur menunjukkan kompetensi dan kemampuan adaptasi yang baik dalam mengelola serta memantau penggunaan aplikasi, meskipun masih ditemukan beberapa kendala partisipasi di tingkat Perangkat Daerah. Dari sisi anggaran, pemerintah daerah melalui kebijakan Bupati telah memberikan dukungan nyata dengan mengalokasikan anggaran tahunan untuk pemeliharaan dan pengembangan aplikasi, yang menjadi bukti komitmen dalam mendukung transformasi digital di bidang pengembangan kompetensi ASN. Ketiga indikator ini menunjukkan bahwa kapasitas organisasi secara umum telah mampu menunjang keberlangsungan dan efektivitas implementasi aplikasi KEMBANG KOPI.

3. *Value (Manfaat)*

Dalam penerapan aplikasi KEMBANG KOPI, nilai atau manfaat yang diberikan kepada pengguna menjadi faktor penting dalam menilai efektivitas dan keberlanjutan inovasi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Salah satu cara untuk mengukur manfaat tersebut

Tabel 3.1
Jumlah Sertifikat yang Telah Divalidasi Oleh BKPSDM Kabupaten Jember Tahun 2021-2023

No.	Tahun	Jumlah Sertifikat
1	2021	257
2	2022	1475
3	2023	38.584

Sumber: BKPSDM Kabupaten Jember 2024

Dari data di atas dapat diketahui bahwa sangat signifikan pengaruh dari adanya aplikasi KEMBANG KOPI dilihat dari jumlah sertifikat pengembangan kompetensi yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah dan di validasi oleh BKPSDM sebagai bukti pengembangan kompetensi meningkat sangat jauh dari tahun sebelumnya yang dimana sistem layanan kepegawaiannya yang masih manual. Lonjakan ini mengindikasikan bahwa aplikasi ini telah berhasil memfasilitasi PNS dalam memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi mereka. Selain itu, tersedianya webinar berkala dalam sistem KEMBANG KOPI memberikan kemudahan tambahan bagi PNS dalam mengumpulkan Jam Pelajaran (JP) tanpa harus melakukan penginputan manual.

Penerapan aplikasi KEMBANG KOPI di Pemerintah Kabupaten Jember memberikan dampak positif dalam pengembangan kompetensi ASN. Aplikasi ini terbukti mudah digunakan, dengan antarmuka yang sederhana dan sistem pelaporan yang terintegrasi. Pengguna merasakan efisiensi waktu dan biaya karena proses administrasi dilakukan secara digital dan terhubung dengan SIASN. Selain itu, tingkat kepuasan ASN meningkat berkat fitur webinar rutin dan otomatisasi pencatatan JP. Secara keseluruhan, KEMBANG KOPI mendukung pengelolaan pengembangan kompetensi ASN yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

3.2 Tantangan dalam Digitalisasi Aparatur Sipil Negara melalui Aplikasi KEMBANG KOPI

Aplikasi KEMBANG KOPI telah memberikan kemudahan dalam pengelolaan pengembangan kompetensi pegawai, akan tetapi masih ada tantangan dalam hal implementasi di Perangkat Daerah tertentu. Perangkat Daerah yang memiliki pegawai dengan mobilitas tinggi, terutama yang bertugas di lapangan, cenderung memiliki tingkat pemanfaatan yang lebih rendah dibandingkan Perangkat Daerah lainnya. Pegawai di dinas seperti Dinas PRKP Cipta

Karya, Dinas PU Bina Marga dan SDA, serta Dinas Lingkungan Hidup sering kali lebih fokus pada pekerjaan di lapangan, sehingga kurang memperhatikan kewajiban mereka dalam mengikuti pelatihan dan menggunakan aplikasi untuk peningkatan pengembangan kompetensi.

3.3 Upaya BKPSDM Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Pengembangan Kompetensi Melalui Aplikasi KEMBANG KOPI

BKPSDM Kabupaten Jember terus berupaya mengoptimalkan penggunaan aplikasi KEMBANG KOPI untuk mendukung pengembangan kompetensi PNS. Upaya yang dilakukan meliputi penyelenggaraan webinar secara berkala melalui aplikasi KEMBANG KOPI. Webinar ini memudahkan PNS dalam memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi di setiap Perangkat Daerah, termasuk memantau partisipasi pegawai dan mengidentifikasi kendala yang muncul. Jika ditemukan tingkat partisipasi yang rendah, BKPSDM melakukan pendekatan khusus melalui sosialisasi tambahan dan pendampingan teknis guna memastikan seluruh PNS dapat mengakses dan memanfaatkan aplikasi dengan optimal.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi dalam manajemen ASN melalui aplikasi KEMBANG KOPI di BKPSDM Kabupaten Jember memberikan dampak positif terhadap efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pengembangan kompetensi ASN. Aplikasi ini terbukti mampu meningkatkan jumlah sertifikat pelatihan yang divalidasi secara signifikan dari tahun ke tahun, yang menunjukkan peningkatan kesadaran dan kemudahan akses ASN dalam memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Zuraida et al. (2023) yang menunjukkan keberhasilan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan melalui aplikasi Klampid New Generation (KNG) di Surabaya. Kedua studi ini sama-sama menekankan pentingnya kemudahan akses dan transparansi dalam layanan publik berbasis digital. Namun, fokus KEMBANG KOPI lebih pada internal birokrasi, yakni peningkatan kualitas ASN melalui manajemen kompetensi, sedangkan KNG lebih pada pelayanan langsung kepada masyarakat. Berbeda dengan penelitian Suprianto (2023) yang menemukan bahwa penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik belum optimal akibat kendala jaringan dan rendahnya respons pelayanan, penelitian ini menunjukkan bahwa kendala teknis seperti gangguan server masih terjadi, namun dapat diatasi dengan cepat tanpa mengganggu proses kerja secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur di BKPSDM Jember lebih baik dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Basyo dan Anirwan (2023) yang menyatakan bahwa digitalisasi memungkinkan pertukaran data yang lebih cepat dan efisien, sehingga mempermudah layanan dan mendorong inovasi. Hal tersebut tercermin dari fitur-fitur KEMBANG KOPI seperti pelaporan mandiri, integrasi dengan SIASN, dan webinar rutin yang mendukung efisiensi dan produktivitas ASN. Dengan demikian, dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, temuan dalam penelitian ini menambahkan perspektif baru terkait digitalisasi yang berfokus pada pengembangan kompetensi ASN secara terintegrasi, dengan pendekatan berbasis dukungan regulasi, kesiapan kapasitas organisasi, dan nilai manfaat yang dirasakan pengguna.

Teknologi informasi memiliki hubungan yang erat dengan penyediaan layanan, karena salah satu faktor utama dalam kualitas layanan adalah kecepatan, yang dapat ditingkatkan dengan penggunaan teknologi tersebut (Sulfiana et al, 2022). Sejalan dengan penelitian ini, karena sama-sama menyoroti pentingnya peran teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Dalam konteks penelitian ini, penerapan digitalisasi melalui aplikasi KEMBANG KOPI di BKPSDM Kabupaten Jember menunjukkan bagaimana pemanfaatan

teknologi dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada ASN, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi sebanyak 20 JP per tahun.

Dengan demikian, dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, temuan dalam penelitian ini menambahkan perspektif baru terkait digitalisasi yang berfokus pada pengembangan kompetensi ASN secara terintegrasi, dengan pendekatan berbasis dukungan regulasi, kesiapan kapasitas organisasi, dan nilai manfaat yang dirasakan pengguna.

IV. KESIMPULAN

Penerapan digitalisasi manajemen ASN melalui aplikasi KEMBANG KOPI telah memberikan kemudahan bagi PNS dalam memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi secara mandiri. Aplikasi ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja, serta didukung oleh regulasi yang kuat seperti Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2022 dan surat edaran terkait. Dari sisi kapasitas, dukungan infrastruktur teknologi, SDM terampil, dan anggaran dinilai sudah memadai, sehingga aplikasi ini memberikan nilai tambah berupa efisiensi dan kemudahan pengelolaan data pelatihan. Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat partisipasi dari beberapa perangkat daerah, terutama yang pegawainya memiliki tugas lapangan dan tingkat mobilitas tinggi. Meskipun aplikasi telah dirancang untuk mempermudah proses, pemanfaatan oleh seluruh pegawai belum optimal. Upaya yang telah dilakukan oleh BKPSDM yakni melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi, antara lain melalui penyelenggaraan webinar secara berkala, serta kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi di tiap perangkat daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu, lokasi, dan biaya penelitian sehingga belum mampu menjangkau seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan digitalisasi manajemen ASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu menyukseskan selama pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alwy, M. (2022). Manajemen Sumber Daya Manusia Di Era Digital Melalui Lensa Manajer Sumber Daya Manusia Generasi Berikutnya. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*. 1(10): 2265–2276.
- Amanuha, G., Hasanah, B., Sururi, A., & Sukendar. (2021). Digitalisasi pemerintahan melalui implementasi SIMRAL dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 126–134.
- Amri, A. (2021). Analisis Leverage Dalam Mengukur Risiko Studi Kasus Pada PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi, & Bisnis*: 2(1):1-13
- Bahari, A., Rahmi, D. Y., Rahmadoni, J., Anwar, K., & Adha, A. A. (2023). Digitalisasi pemerintahan nagari melalui implementasi Sistem Informasi Manajemen Nagari di Nagari Kamang Mudiak Kabupaten Agam. *Jurnal Hilirisasi IPTEKS*, 6(2), 62–70.

- Basyo, I., dan Anirwan. (2023). Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur. *IJI Publication*, 4(1): 23-31.
- Indrajit, R. E. (2016). *Electronic Government: Konsep dan Strategi*. Jakarta: Andi Offset.
- Mathis, R dan John, H. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods* (Tjetjep Rohendi Rohidi, Trans.). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). (Original work published 1984)
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial (Lutfiah (ed.)). Media Sahabat Cedekia.
- Nurdin, I., Qomariah, D., Imelda, I. N., & Dwiyantanto. (2024). Manajemen Sumber Daya Manusia. PT Media Penerbit Indonesia.
- Nurrahman, A., Dimas, M., Ma'sum, M. F., & Ino, M. F. (2021). Pemanfaatan website sebagai bentuk digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Garut. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 3(1), 78–93.
- Puron-Cid, G., Luna-Reyes, L. F., & Gil-Garcia, J. R. (2021). Information sharing in the public sector: A literature review and research agenda. *Government Information Quarterly*, 38(1), 101545. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101545>
- Rachmatullah, N., & Purwani, F. (2022). Analisis Pentingnya Digitalisasi & Infrastruktur Teknologi Informasi Dalam Institusi Pemerintahan: E-Government. *Jurnal Fasilkom*, 12(1), 14–19.
- Simangunsong F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulfiana, S., dkk. (2022). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. *Kybernology: Journal of Government Studies*, 2(2): 133-156.
- Suprianto, B. (2023). Literature review: Penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 8(2), 123–128.
- Wijaya, R., Nugroho, Y., & Hadi, T. (2022). Digitalization in public service: Employee engagement in the SIPEKAT system. *Government Information Quarterly*, 39(1), 101581. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101581>
- Yonghua. J., dkk (2025). *Information Technology and Management*. Springer. <https://link.springer.com/journal/10799>
- Zuraida, N. A., Hendrati, I. M., & Wardaya, W. (2023). Digitalisasi pelayanan publik melalui program Kalimasada di Kelurahan Keputih, Kota Surabaya. *Jurnal Akses Pengabdian Indonesia (JAPI)*, 8(2), 163–168.